

Modul ISAK 335

Oleh Hadi Prayitno





Modul ISAK 335

Oleh Hadi Prayitno

© 2025, Re.Search

Daftar Isi

BAB 1

Pengantar

- 6 / a. Pengelolaan Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil
- 6 / b. Kewajiban Pelaporan Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil

BAB 2

Apa itu ISAK 335?

- 11 / a. Memahami PSAK 45 versus ISAK 335
- 21 / b. Pelaporan Keuangan Berasal dari Pencatatan Transaksi Keuangan
- 24 / c. Pencatatan Keuangan Khususnya Biaya Harus Merujuk kepada Anggaran yang Tersedia
- 25 / d. Pencatatan Transaksi Keuangan Terjadi Karena Pemberlakuan Mekanisme Keuangan (SOP)

BAB 3

Penutup

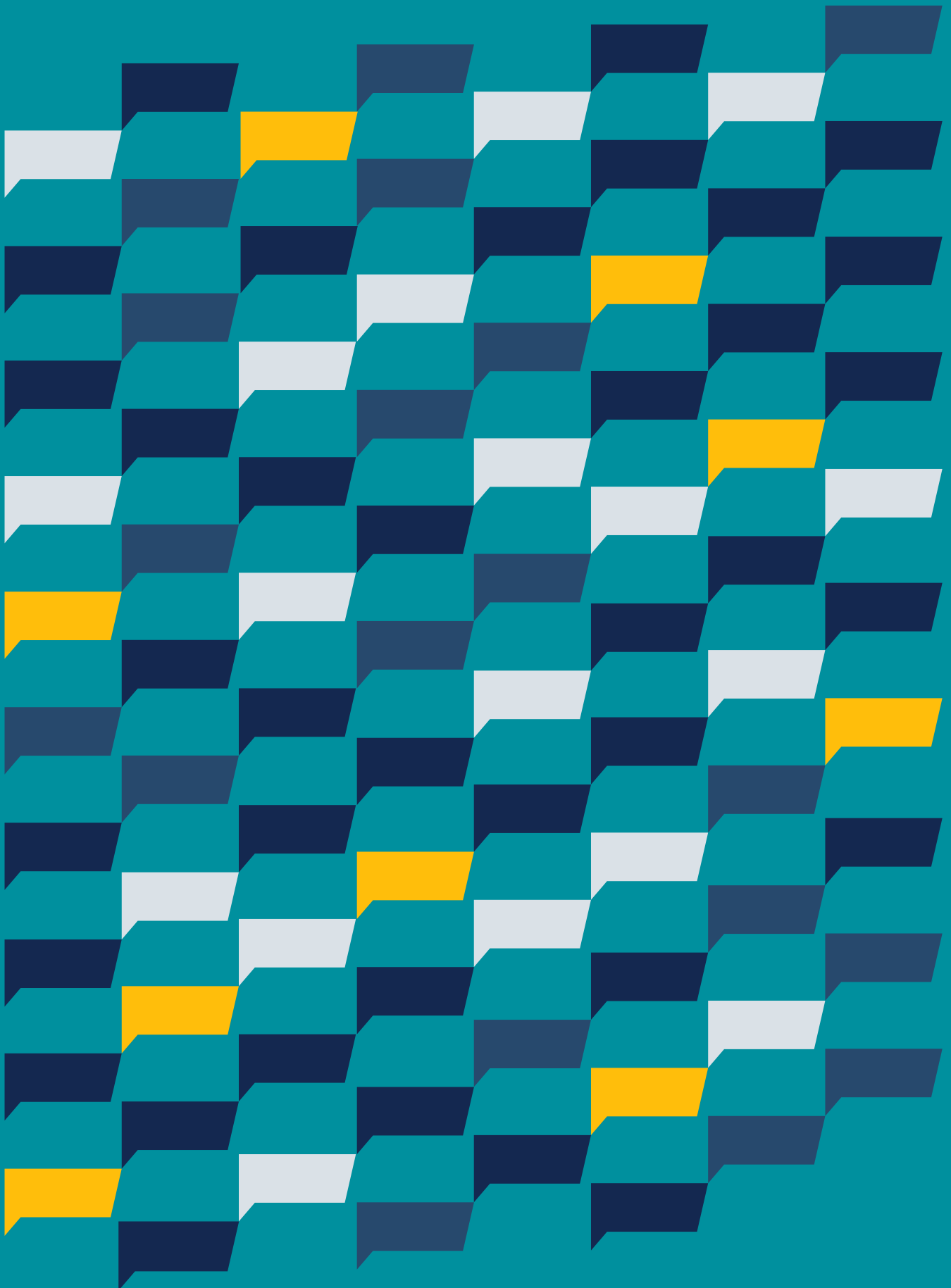
- 28 / a. Meningkatkan Wawasan Pengelolaan Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil Melalui Pengayaan Bacaan dan Mengikuti Pelatihan
- 29 / b. Menggunakan Alat Bantu Pertanggungjawaban Keuangan untuk Memudahkan Pekerjaan

Daftar Diagram

- 13 / Diagram 1 Defenisi: "PSAK no.45 mengatur format standar pelaporan keuangan Nirlaba"
- 21 / Diagram 2 Alur Pelaporan Keuangan

Daftar Tabel

- 23 / Tabel 1 Alur Pengklasifikasian Transaksi



BAB 1

Pengantar

a.

Pengelolaan Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil

Pengelolaan keuangan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia berbeda dengan organisasi yang berorientasi profit (organisasi profit) karena memang berbeda dari motif pendiriannya. Proses bisnisnya juga tidak serumit dan sekompleks organisasi profit. OMS tidak bertujuan mencari keuntungan, sedangkan organisasi profit didirikan oleh pemiliknya untuk mencapai satu tujuan yaitu memaksimalkan nilai organisasi profit (*maximizing value of the firm*).

Selain itu, dalam konteks keberlanjutan finansial, OMS perlu memahami strategi pengelolaan keuangan yang tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga perencanaan keuangan jangka panjang. [Modul Pengelolaan Keuangan Strategis bagi Organisasi](#) yang tersedia di Re.Search dirancang untuk membantu OMS mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Dengan memahami konsep seperti diversifikasi pendanaan, pengelolaan risiko keuangan, serta pengukuran kinerja keuangan yang relevan bagi OMS, organisasi dapat meningkatkan ketahanan finansialnya dan memastikan keberlanjutan program yang dijalankan.

b.

Kewajiban Pelaporan Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil

Sebagaimana disebutkan dalam UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah disempurnakan dengan UU 28 tahun 2004 Pasal 52 dan Perubahan Atas Undang-Undang (PERPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 38 bahwa Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Menyusun laporan keuangan bukan pekerjaan sederhana. OMS seperti Yayasan dan Perkumpulan harus menyusun laporan keuangan organisasinya untuk:

- ✓ Mencerminkan kesehatan keuangan dan keberlanjutan OMS,
- ✓ Membangun kepercayaan kepada donatur, mitra dan para pihak yang berkepentingan,
- ✓ Mencari pendanaan dengan para donatur baru,
- ✓ Mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya,
- ✓ Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi kepada publik.

Menyusun laporan keuangan yang efektif bagi OMS lebih dari sekedar angka dan posisi keuangan. Laporan keuangan akan mengartikulasikan cerita keuangan OMS dengan cara yang menginspirasi, sambil tetap menjaga integritas data. Dimulai dari pengumpulan data keuangan dengan seksama, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan investasi sampai tersajinya laporan keuangan yang informatif.

Sejak 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2019, penyusunan laporan keuangan OMS merujuk kepada PSAK 45 tentang Standar Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Menurut PSAK 45, laporan keuangan yang disusun akan terdiri dari 4 komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan adalah gambaran dari kondisi keuangan OMS pada suatu titik waktu tertentu. Ini menggambarkan aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dan aset netto (kekayaan bersih). Laporan posisi keuangan membantu dalam memahami sejauh mana OMS memiliki kecukupan sumber daya untuk mencapai misinya.

Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif menceritakan kisah tentang pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan OMS selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun buku. Laporan ini meliputi pendapatan dari sumbangan, hibah, kontribusi, layanan, penghasilan dari pemanfaatan fasilitas OMS, investasi, sisa dana kerjasama dengan donator yang diberikan kepada OMS serta pengeluaran untuk belanja program, pendanaan serta manajemen dan umum. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran ditambah dengan penghasilan komprehensif lainnya akan menghasilkan informasi sisa lebih atau surplus/defisit yang memberikan gambaran tentang kesehatan finansial dan efektivitas aktivitas OMS. Laporan ini juga menyajikan adanya perubahan aset netto dari seluruh aktivitas OMS baik yang sifatnya Tanpa Pembatasan (tidak terikat) maupun yang sifatnya Dengan Pembatasan (terikat).

Laporan Arus Kas

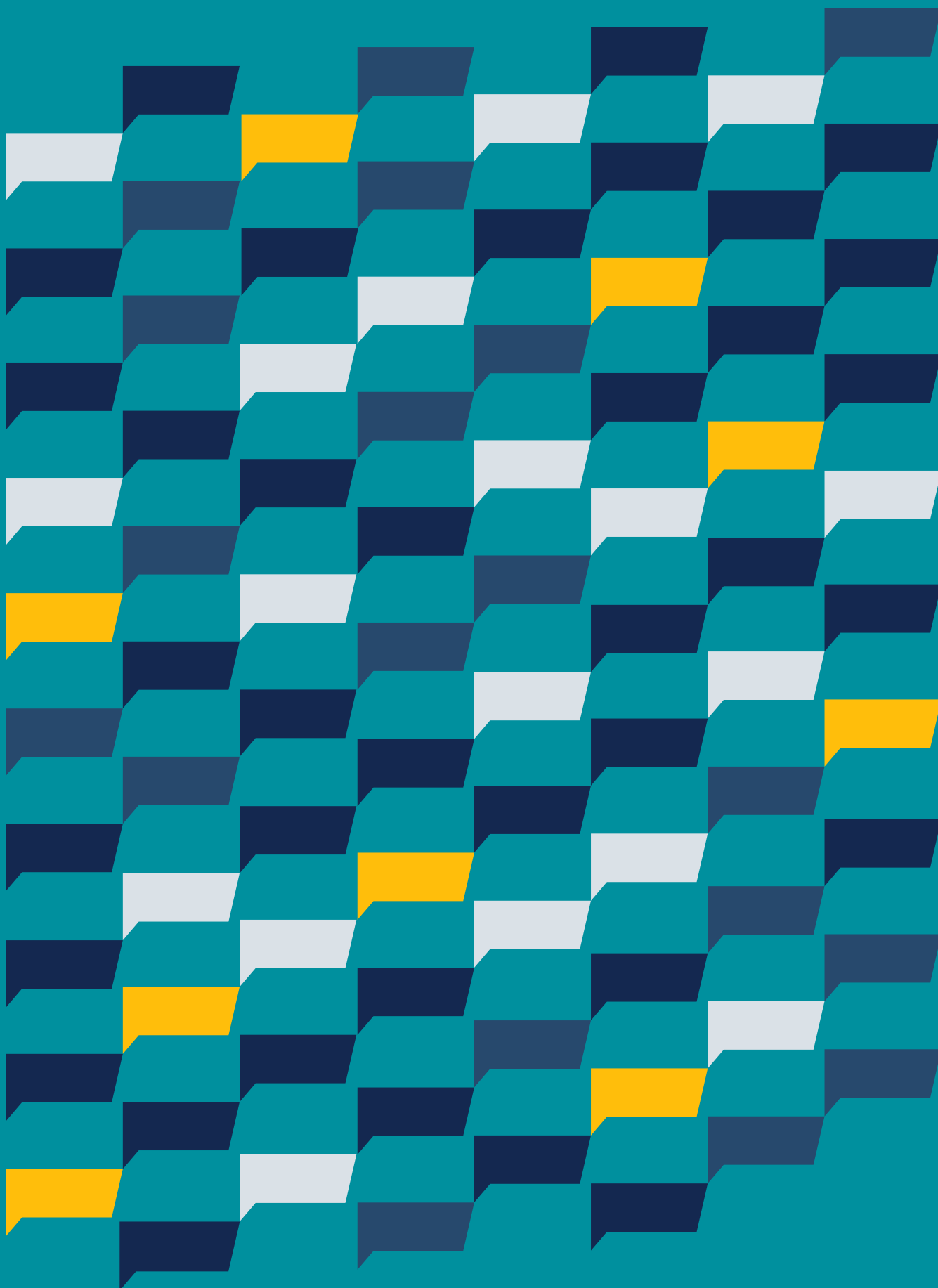
Laporan Arus Kas menunjukkan aliran masuk dan keluar dana dalam periode tertentu. Hal ini mengilustrasikan bagaimana dana mengalir melalui:

- Aktivitas operasional: seperti kegiatan program dan pendanaan,
- Aktivitas investasi: pengadaan aset tetap dan aset lainnya,
- Aktivitas pendanaan: seperti pinjaman dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan sebuah catatan terkait laporan keuangan OMS dimana dalam catatan ini menyajikan informasi terkait yang belum disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas dan perlu penjelasan lebih detail sehingga penyampaian informasi dapat tersaji.

Pada 1 Januari 2020, PSAK 45 sudah dicabut dan diganti dengan ISAK 35, sehingga diperlukan pemahaman lebih dalam tentang ISAK 35. Dengan adanya perubahan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35, kita perlu mengetahui apa saja yang berubah pada saat harus membuat laporan keuangan untuk OMS.



BAB 2

Apa itu ISAK 335?

a.

Memahami PSAK 45 versus ISAK 335

Melanjutkan penjelasan pada bahasan sebelumnya, PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba diterbitkan pertama kali pada 23 Desember 1997 oleh DSAK IAI dan berlaku efektif per 1 Januari 2000, kemudian direvisi pada 8 April 2011. PSAK 45 menjadi rujukan utama organisasi yang tidak berorientasi laba seperti Yayasan dan Perkumpulan dalam penyajian laporan keuangan. Menurut PSAK 45, jenis laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari 4 jenis yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan Perubahan Aset Netto merupakan alternatif.

PSAK 45 menjelaskan perbedaan organisasi non profit dengan organisasi profit. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi non profit memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Karakteristik organisasi non profit tersebut menyebabkan adanya transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi profit, misalnya penerimaan sumbangan. Namun, dalam praktiknya, organisasi non profit seringkali tampil dalam berbagai bentuk sehingga sulit dibedakan dengan organisasi profit pada umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi non profit, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan dananya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Artinya, organisasi tersebut harus melakukan *fundraising* untuk mendapatkan sumber-sumber dana lain yang tidak terikat.

Akibatnya, pengukuran jumlah, waktu, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi profit pada umumnya.

Para pengguna laporan keuangan organisasi non profit memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi profit, yaitu untuk menilai:

- ✔ Jasa yang diberikan oleh organisasi non profit dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan
- ✔ Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer.

Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas/kewajiban, aset netto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset netto, baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang juga disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Selain itu, laporan aktivitas juga harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.

Definisi: "PSAK No. 45 mengatur format standar pelaporan keuangan Nirlaba"

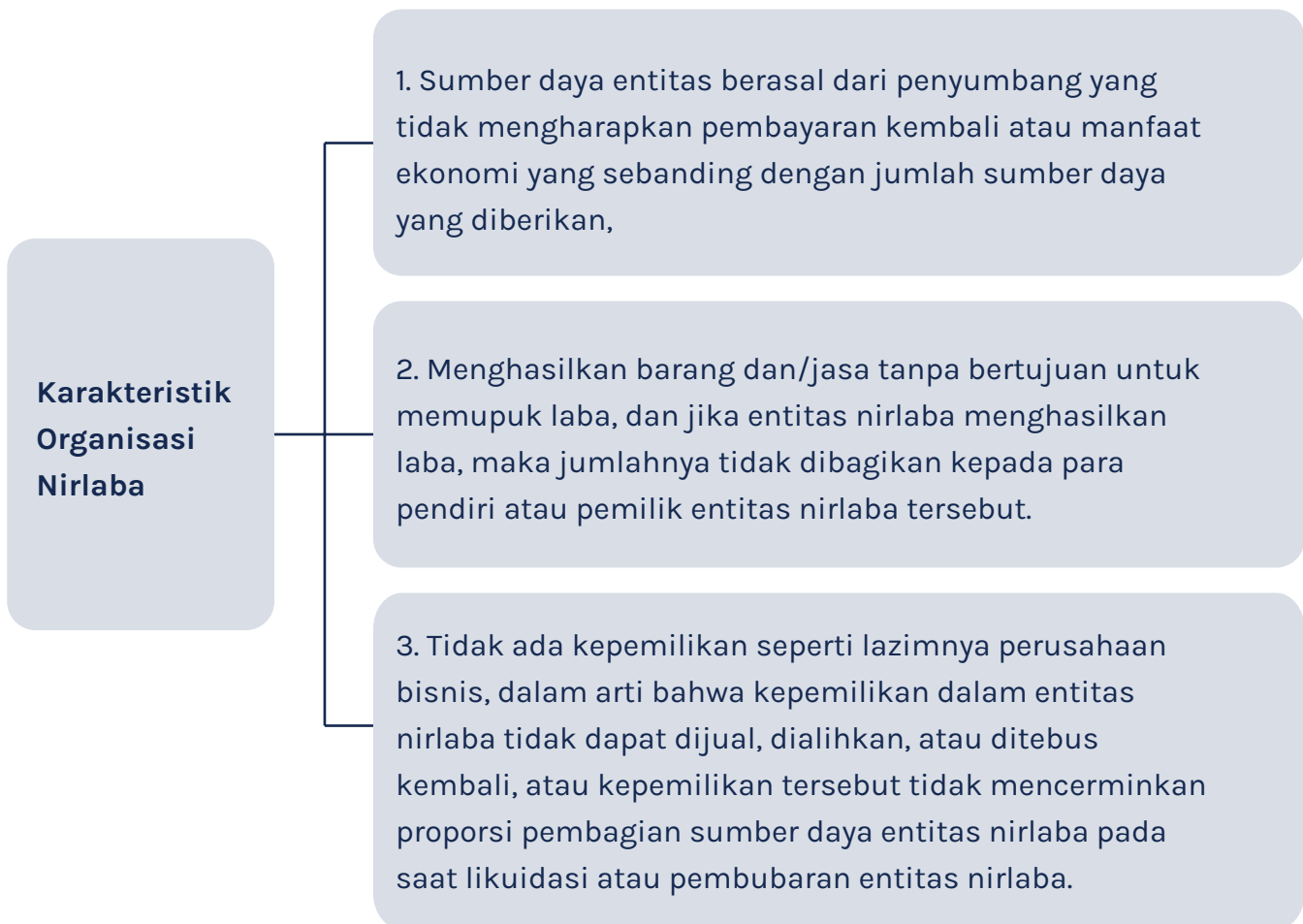


Diagram 1 Definisi: "PSAK No. 45 mengatur format standar pelaporan keuangan Nirlaba"

Selain itu, PSAK 45 juga memberikan beberapa pemahaman dan definisi yang membedakan organisasi non profit dengan organisasi profit sebagai berikut:

- ✓ Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- ✓ Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- ✓ Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- ✓ Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Seiring dengan proses konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia kepada International Financial Report Standards (IFRS) mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena SAK berbasis IFRS menganut prinsip "*transaction based*" bukan "*entity based*". Seluruh SAK yang mengatur entitas dicabut karena sudah diatur pada SAK induk yaitu SAK Umum, SAK ETAP atau SAK EMKM (per 1 Januari 2025 sudah diganti menjadi SAK Entitas Privat/ SAKEP). Termasuk PSAK 45 juga harus dicabut berdasarkan konvergensi SAK ke IFRS tersebut.

Penyusunan laporan keuangan pada organisasi non profit sekarang ini merujuk pada ISAK 35 (nama ISAK 35 berubah menjadi ISAK 335 per 1 Januari 2024) sesuai keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang mencabut PSAK 45 dengan PPSAK nomor 13 dan telah mengesahkan ISAK 35 sebagai pedoman Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020.

Pencabutan PSAK 45 menjadi ISAK 35 melalui Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) nomor 13 tentang Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Selanjutnya, seluruh organisasi di Indonesia baik organisasi non profit maupun organisasi profit dalam menyusun laporan keuangannya akan mengacu kepada salah satu dari 4 (empat) SAK yang ada di Indonesia yaitu:

- SAK berbasis IFRS (biasanya disebut SAK Umum),
- SAK bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (biasanya disebut SAK ETAP),
- SAK bagi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (atau biasa disebut SAK EMKM)
- SAK bagi Entitas berbasis Syariah (biasa disebut SAK Syariah) menyesuaikan karakteristik dari organisasinya. Termasuk OMS dan organisasi non profit lainnya juga harus memilih salah satu dari 4 SAK tersebut.

Beberapa perbedaan penting antara PSAK 45 dan ISAK 35

Cakupan Wilayah

Perbedaan pertama antara PSAK 45 dan ISAK 35 adalah cakupan wilayahnya. PSAK 45 adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (BSAK) dan digunakan di dalam negeri. Sebaliknya, ISAK 35 diterbitkan oleh International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation dan memiliki cakupan internasional yang luas. Sebagian besar negara di seluruh dunia mengadopsi atau mengacu pada IFRS dalam rangka mengharmonisasi praktik akuntansi mereka dengan standar internasional.

Sebagai contoh, organisasi yang berbasis di Indonesia yang beroperasi di luar negeri dan ingin melaporkan hasil keuangannya sesuai dengan standar internasional akan lebih memilih menggunakan ISAK 35 daripada PSAK 45. Ini memastikan bahwa laporan keuangan mereka dapat dipahami dan diterima secara global.

Jenis dan Format Laporan

Jenis dan format laporan keuangan dalam PSAK 45 juga berbeda dengan ISAK 35, dimana dalam PSAK 45 terdiri dari 4 jenis laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut ISAK 35, terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Netto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa perbedaan lainnya antara PSAK 45 dan ISAK 35 yang bersifat teknis adalah sebagai berikut:

✓ **Klasifikasi Aset Netto**

Dalam PSAK 45, sumber daya diklasifikasikan ke dalam 3 pos, yaitu aset netto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Sedangkan dalam ISAK 35, sumber daya hanya terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan.

✓ **Judul Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dalam PSAK 45 dikenal dengan istilah Laporan aktivitas yang memuat informasi pendapatan dikurangi beban sama dengan surplus atau defisit tahun berjalan lalu ditambah saldo awal sama dengan saldo akhir. Sedangkan pada ISAK 35, laporan keuangan disebut Laporan Penghasilan Komprehensif yang hanya memuat informasi sampai surplus atau defisit tahun berjalan.

✓ **Laporan Aset Perubahan Aset Netto**

Pada PSAK 45, laporan perubahan aset netto hanya sebagai alternatif, sedangkan pada ISAK 35, laporan perubahan aset netto merupakan bagian dari jenis laporan keuangan entitas nonlaba.

✓ **Penghasilan Komprehensif Lain**

ISAK 35 juga mengakomodir penghasilan komprehenfi lain dalam penyajian laporan keuangan, terutama untuk entitas yang menjadikan SAK berbasis IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

ISAK 35 sendiri merupakan hasil implementasi atau turunan dari PSAK 1 pada paragraf 5 yang memberikan contoh kepada organisasi yang berorientasi non profit untuk melakukan penyesuaian pada deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan OMS dan organisasi non profit lainnya harus memenuhi ketentuan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam paragraf 05 PSAK 1 yang berbunyi,

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.

Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan organisasi terlepas dari bentuk badan hukum organisasi tersebut, namun PSAK 1 membedakan format laporan keuangannya, yaitu organisasi yang berorientasi laba menggunakan format laporan dalam lampiran PSAK 1 (per 1 Januari 2024 disebut PSAK 201) dan organisasi yang berorientasi nonlaba menggunakan format laporan dalam ISAK 35 (per 1 Januari 2024 disebut ISAK 335). Dengan demikian, apabila OMS dan organisasi non profit lainnya ingin menyajikan laporan keuangan, maka harus menggunakan format laporan keuangan dalam ISAK 35.

Berkaitan dengan penerapan ISAK 35, para pengelola OMS dan organisasi non profit lainnya dapat mengubah nomenklatur atau deskripsinya agar sesuai dengan kebutuhan, tetapi harus memperhatikan hal-hal berikut:

- ✔ Organisasi non profit dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh organisasi non profit mengharuskan organisasi untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, organisasi dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan (*with restrictions*) atau tidak adanya pembatasan (*without restrictions*) oleh pemberi sumber daya.
- ✔ Organisasi non profit juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, penyesuaian atas penggunaan judul 'laporan perubahan aset netto' daripada 'laporan perubahan ekuitas'. Penyesuaian atas judul laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.
- ✔ Organisasi non profit tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sesuai ISAK 35, komponen laporan keuangan organisasi non profit terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Netto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

✔ Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan terdiri dari 3 unsur, yaitu aset , liabilitas, dan aset netto. Terdapat 2 (dua) format Laporan Posisi Keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Setiap format memiliki keunggulan masing-masing.

a. Aset

Pada umumnya organisasi non profit menyajikan dan mengumpulkan aset kelompok yang homogen. Diantaranya adalah:

- Kas dan Setara Kas
- Piutang
- Uang Muka
- Persediaan
- Biaya Dibayar Dimuka
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap berupa Tanah, Gedung, Peralatan serta Aset Tetap Lain yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa

b. Liabilitas

Contoh urutan dan penyajian liabilitas/ kewajiban adalah:

- Hutang
- Hutang Pajak
- Biaya yang Masih Harus Dibayar
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Dana Titipan
- Hutang Jangka Panjang

c. Aset Netto

Aset netto berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya menjadi dua klasifikasi aset netto yaitu:

- Aset Netto Tanpa Pembatasan (*without restrictions*) yaitu aset netto yang tidak ada batasan terhadap aset tersebut, misalnya sumbangan yang diberikan oleh si donatur, dimana donatur tidak secara jelas mencantumkan jangka waktu dari donasinya tadi hanya untuk memberikan donasi untuk organisasi non profit tersebut sehingga pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan organisasi non profit dapat mempergunakannya untuk kebutuhan organisasi.
- Aset Netto Dengan Pembatasan (*with restrictions*) atau aset netto yang menggabungkan klasifikasi aset netto terikat permanen dan aset netto terikat temporer menjadi aset netto dengan pembatasan. Aset netto dengan

pembatasan adalah aset netto yang berkaitan dengan sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, dan aset netto yang digunakan untuk selamanya, seperti tanah dan bangunan yang diberikan untuk tujuan tertentu, sehingga pemasukan dan pengeluarannya itu diluar organisasi non profit seperti kas anak yatim, kas fakir miskin dan lain lain.

Terdapat 2 (dua) format Laporan Posisi Keuangan yang disajikan yaitu

✔ Format A yang menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset netto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset netto dengan pembatasan, maka organisasi menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas asset netonya.

✔ Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

✔ **Laporan Penghasilan Komprehensif**

Laporan penghasilan komprehensif menunjukkan jumlah perubahan aset netto tanpa pembatasan dan aset netto dengan pembatasan dalam suatu periode. Laporan penghasilan komprehensif terdiri dari 2 unsur, yaitu penerimaan dan biaya. Terdapat 2 (dua) format Laporan Penghasilan Komprehensif yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Setiap format memiliki keunggulan masing-masing.

a. Penerimaan

Pada umumnya organisasi non profit menyajikan dan mengumpulkan penerimaan kelompok yang homogen, yaitu penerimaan dari sumbangan (Pendapatan) dan penerimaan dari non sumbangan (Penghasilan). Diantaranya adalah:

- Sumbangan
- Hibah
- Hibah Barang
- Bantuan Pemerintah
- Donasi CSR
- Kontribusi
- Iuran Anggota
- Layanan Jasa (Pendidikan, Kesehatan, Advokasi, Konsultasi dll)
- Penyewaan Fasilitas Kantor
- Hasil Investasi (Bunga Deposito, Bunga Reksadana, Bagi Hasil Investasi Lainnya)
- Penjualan Produk (Aksesoris, Agenda, Kalender, Media Kampanye lainnya)

- Aset Netto Berakhir Batasannya (siswa hibah donatur yang diserahkan ke Organisasi)
- Aset Netto yang Dibebaskan dari Pembatasan (item laporan keuangan standar dari ISAK 35 untuk mencatat penyesuaian jurnal biaya terikat yang dilaporkan sebagai biaya tidak terikat)
- Penerimaan Bunga Bank/Jasa Giro/Bagi Hasil, dll
- Penerimaan Lainnya (Laba Selisih Kurs, Laba Penjualan Aset Tetap)

b. Biaya

Penyajian biaya dalam ISAK 35 dikategorikan dalam 3 kelompok sesuai Catatan E sebagaimana dijelaskan dalam [Lampiran. 3](#) kelompok biaya tersebut adalah biaya Program, biaya Manajemen Umum dan biaya Pendanaan. Semua item jenis biaya yang ada akan dikelompokkan dalam 3 kategori biaya tersebut. Contoh urutan dan penyajian biaya yang akan masuk ke dalam masing-masing kategori adalah:

- Biaya Personil (Biaya Gaji, Tunjangan, Asuransi, BPJS, dll)
- Biaya Profesional (Biaya Audit, Biaya Notaris, Honorarium, Fee, Upah, dll)
- Biaya Perjalanan (Biaya Tiket Darat/Laut/Udara, Akomodasi, Transport Bandara, Biaya Konsumsi, Paket Meeting, dll)
- Biaya Pengadaan Peralatan (Biaya Beli Inventaris Kerjasama Program dengan Donatur, dll)
- Biaya Publikasi (Biaya Cetak, Biaya Dokumentasi, Biaya Banner/Flyer/Spanduk, dll)
- Biaya Admin Kantor (Biaya ATK, Listrik, Air, Komunikasi, Internet, Keamanan, Kebersihan, dll)
- Biaya Penyusutan (Biaya Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Organisasi)
- Biaya Lain-lain

Laporan Perubahan Aset Netto

Laporan perubahan aset netto adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan tentang aset netto (kekayaan bersih) organisasi. Laporan ini meliputi aset netto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Perubahan aset netto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan disajikan terpisah antara perubahan aset netto dari aktivitas utama dan bukan aktivitas utama. Perubahan aset netto dari aktivitas utama akan digambarkan dari perubahan surplus/defisit setiap periode dan akumulasinya. Sedangkan perubahan aset netto dari bukan aktivitas utama digambarkan dari perubahan item penghasilan komprehensif lainnya setiap periode.

Laporan Arus Kas

Penyajian laporan arus kas pada ISAK 35 (per 1 Januari 2024 berubah menjadi ISAK 335) tidak berbeda dengan laporan arus kas pada PSAK 1 (per 1 Januari 2024 berubah menjadi PSAK 201). Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam suatu periode, dimana penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan sehingga akan diketahui saldo akhir kas dan setara kas organisasi.

b.

Pelaporan Keuangan Berasal dari Pencatatan Transaksi Keuangan

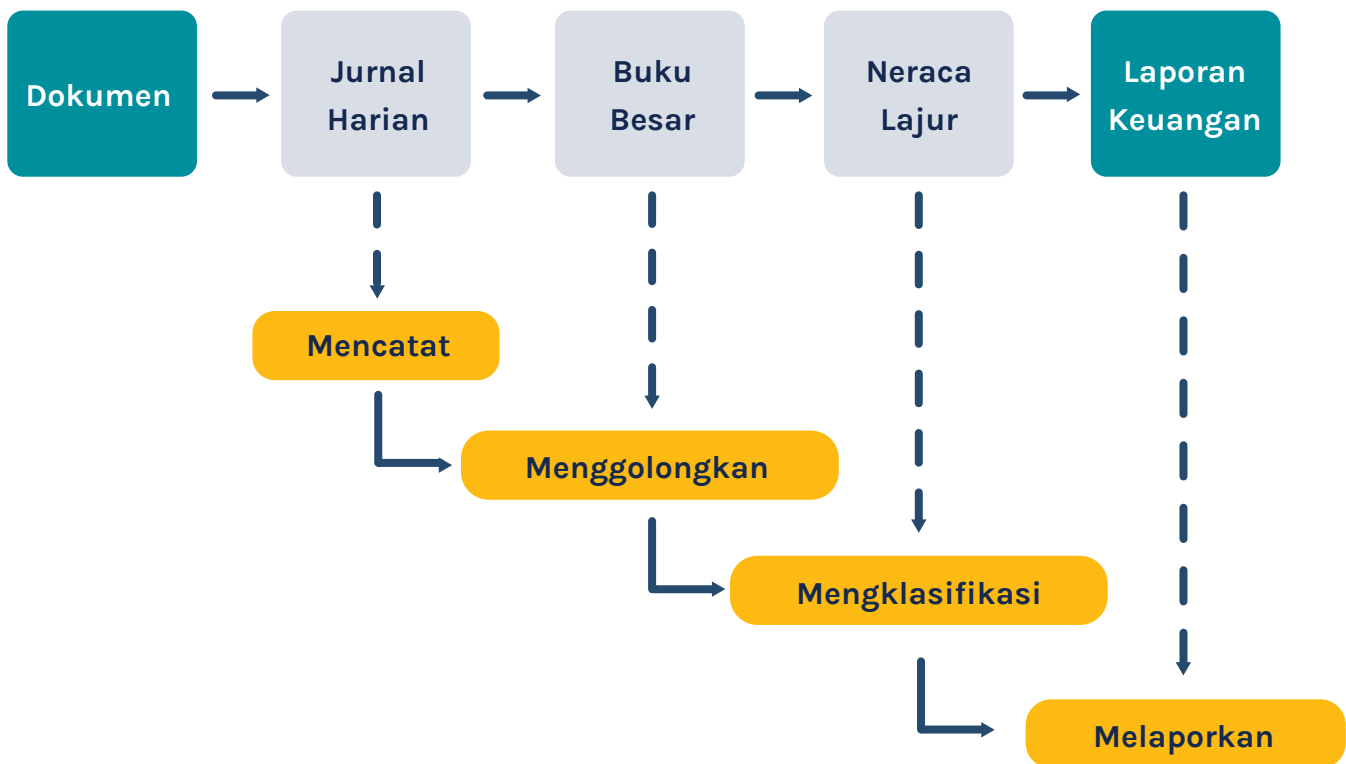


Diagram 2 Alur Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan tahap akhir dari suatu pembukuan organisasi yang mencatat transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan dalam suatu periode. Jadi, laporan keuangan merupakan bagian akhir dari suatu proses akuntansi organisasi.

Proses akuntansi itu sendiri merupakan sistem atau prosedur yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisa, dan menyajikan informasi keuangan. Tujuan proses akuntansi adalah memberikan informasi keuangan yang mudah dimengerti kepada para pihak yang berkepentingan dan membantu memahami posisi keuangan, kekuatan dan kelemahan organisasi serta membantu mereka dalam pengambilan keputusan terhadap organisasi.

Secara garis besar, proses akuntansi akan menggambarkan urutan dari awal setelah terjadinya transaksi sampai menjadi suatu laporan keuangan yang komprehensif sesuai

standar akuntansi yang berlaku (dalam hal ini OMS mengikuti format ISAK 35/ISAK 335). Urutan proses akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Transaksi

Tahap awal proses akuntansi adalah mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi. Tahapan ini akan melibatkan pengumpulan data transaksi. Pada umumnya dalam organisasi non profit, transaksi keuangan akan terdiri dari transaksi penerimaan kas dan bank, transaksi pengeluaran kas dan bank, transaksi keuangan yang tidak melibatkan kas dan bank tetapi harus dicatat. Baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dan bank terjadi dari beberapa jenis transaksi seperti:

- Transaksi pengajuan uang muka dan pertanggungjawabannya,
- Transaksi penerimaan hibah dari donatur,
- Transaksi talangan dana organisasi untuk memulai proyek kerjasama dengan donatur,
- Transaksi biaya,
- Transaksi hutang piutang dan beberapa transaksi keuangan lainnya yang diterima maupun dikeluarkan melalui kas dan bank.

2. Pengklasifikasian Transaksi

Setelah semua transaksi keuangan tercatat dalam tahap pertama di atas, selanjutnya, semua transaksi akan diklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai, seperti:

Kategori Transaksi	Contoh atau Penjelasan
Kas	Transaksi tunai seperti penerimaan dan pengeluaran uang tunai.
Bank	Transaksi melalui rekening bank, seperti transfer, setoran, atau penarikan.
Piutang	Tagihan yang belum diterima dari pihak ketiga.
Aset Tetap	Pembelian atau penjualan aset seperti gedung, kendaraan, atau peralatan.
Hutang	Kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar.
Biaya yang Masih Harus Dibayar	Biaya yang sudah terjadi namun belum dibayarkan, seperti gaji atau utilitas.
Dana Titipan	Dana yang diterima untuk kepentingan pihak lain dan belum menjadi hak organisasi.
Penerimaan Ditangguhkan	Dana yang diterima tetapi belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum digunakan.
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	Kewajiban kepada karyawan setelah masa kerja berakhir (pensiun, pesangon, dll.).

Penerimaan dari Sumbangan	Hibah, donasi, kontribusi, dan sumbangan lainnya.
Penerimaan dari Selain Sumbangan	Penghasilan dari layanan jasa, penyewaan fasilitas, hasil investasi, penjualan produk.
Penerimaan Aset Neto yang Berakhir Batasannya	Dana yang sebelumnya dibatasi penggunaannya dan kini sudah dapat digunakan secara bebas.
Penerimaan Lainnya	Penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori lain di atas.
Biaya Program	Pengeluaran untuk mendukung pelaksanaan program utama organisasi.
Biaya Pendanaan	Biaya terkait kegiatan penggalangan dana.
Biaya Manajemen Umum	Pengeluaran untuk operasional organisasi seperti administrasi dan manajemen.

Tabel 1 Alur Pengklasifikasian Transaksi

3. Pengoreksian dan Penyesuaian

Selama periode tertentu, akan ada penyesuaian yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, menghitung penyusutan aset tetap atau menyesuaikan penerimaan hibah ditanggihkan menjadi penerimaan hibah sesuai biaya program kerjasama dengan donatur, dan penyesuaian lainnya agar mencerminkan keadaan *actual*.

4. Penyusunan Laporan Keuangan

Setelah semua transaksi dicatat, diklasifikasikan, dan disesuaikan, maka akan dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini organisasi non profit akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Netto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Interpretasi dan Analisis

Laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk memahami kinerja keuangan, *trend* pertumbuhan keuangan, dan sekaligus mengetahui kesehatan keuangan organisasi. Analisis ini akan membantu para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan strategis dan perbaikan keuangan organisasi yang diperlukan.

6. Pengawasan dan Audit

Tahapan akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan di audit untuk memastikan keakuratan dan keandalannya, dengan standar audit yang berlaku sehingga hasil audit ini dapat digunakan oleh para pihak menilai organisasi dalam hal pengelolaan keuangan yang tercermin dari laporan keuangan yang disajikan.

C.

Pencatatan Keuangan Khususnya Biaya Harus Merujuk kepada Anggaran yang Tersedia

Berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan khususnya transaksi biaya pada organisasi non profit, maka hal yang perlu diperhatikan adalah setiap biaya yang dibelanjakan harus ada anggaran yang ditetapkan sebelumnya sehingga setiap pembelanjaan menjadi terkontrol. Tanpa adanya anggaran, organisasi tidak akan bisa memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk tetap dapat menjalankan operasional organisasi.

Dengan demikian, anggaran mutlak harus dibuat jauh hari sebelum dimulainya tahun buku organisasi. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dan kuantitatif untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam periode tertentu.

Bagaimana menyusun anggaran yang baik dan efektif, dapat dibaca pada modul [Pengelolaan Keuangan Strategis](#).

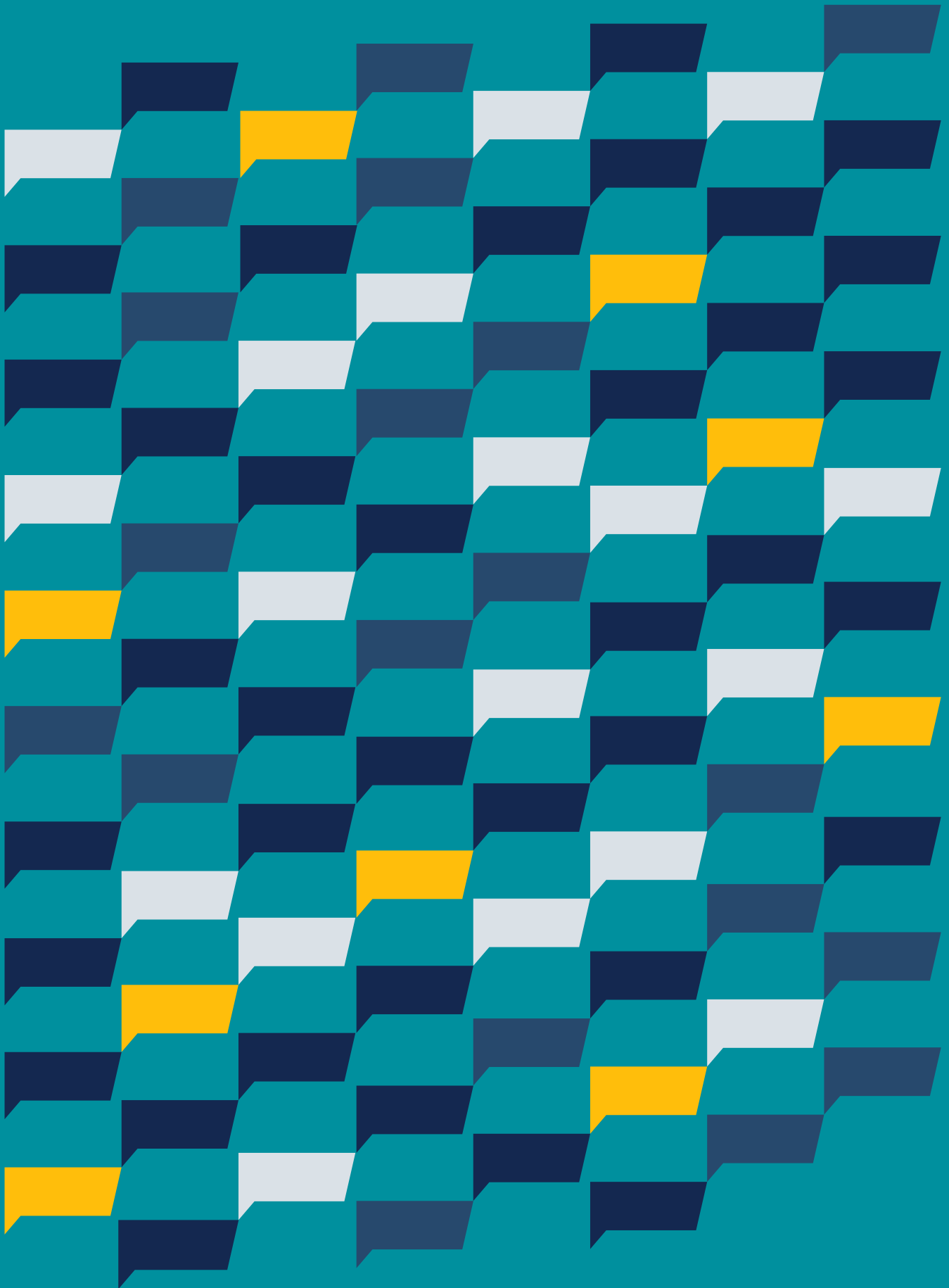
d.

Pencatatan Transaksi Keuangan Terjadi Karena Pemberlakuan Mekanisme Keuangan (SOP)

Seluruh transaksi keuangan organisasi akan mengikuti mekanisme keuangan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang berlaku. Hal ini diperlukan agar pengelolaan transaksi keuangan menjadi seragam dan konsisten untuk transaksi keuangan yang sama atau sejenis. Pada umumnya, satu transaksi keuangan yang sama akan diperlakukan dengan cara yang sama, sebagai contoh transaksi uang muka. Transaksi uang muka akan dimulai dari pengajuan uang muka terlebih dahulu sampai disetujui pimpinan, lalu dipertanggungjawabkan setelah kegiatan diselesaikan. Urutan transaksi uang muka ini tidak mungkin di balik yaitu dilakukan pertanggungjawaban dulu baru kemudian mengajukan uang muka. Inilah yang dimaksudkan perlunya SOP keuangan untuk mengelola dan mengatur transaksi keuangan agar seragam dan konsisten untuk satu transaksi keuangan yang sama dan sejenis.

Oleh karena itu, SOP Keuangan menjadi penting untuk dimiliki dan dijadikan dokumentasi dalam suatu organisasi. Demikian juga dengan SOP selain keuangan perlu dibuat dan didokumentasikan dalam organisasi agar menjadi rujukan dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

Penyusunan SOP Keuangan dan SOP lainnya tidak harus idealis tetapi harus aplikatif dan sesuai kebutuhan. SOP Keuangan akan disusun mengikuti perkembangan organisasi dan kompleksitas transaksi, sehingga SOP Keuangan tidak boleh kaku dan harus dievaluasi setiap periode tertentu (tetapi tidak setiap tahun ganti SOP). Misalnya SOP Keuangan dievaluasi setiap tahun. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian SOP Keuangan dengan kondisi masa kini tetapi bersifat MINOR, maka perubahan yang dilakukan cukup dengan menambahkan pengecualian atas isi SOP Keuangan yang sudah tidak mutakhir lagi tanpa harus mengubah SOP Keuangan secara keseluruhan. Tetapi apabila memang pada akhirnya hampir seluruh isi SOP Keuangan perlu dimutakhirkan maka sudah saatnya organisasi untuk menyempurnakan SOP Keuangannya. Dengan demikian SOP Keuangan akan senantiasa menjadi rujukan dan pedoman dalam pengelolaan transaksi keuangannya organisasi dari mulai pengelolaan dokumen transaksi, proses akuntansi sampai penyajian laporan keuangannya.



BAB 3

Penutup

a.

Meningkatkan Wawasan Pengelolaan Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil Melalui Pengayaan Bacaan dan Mengikuti Pelatihan

Pengelolaan keuangan OMS dan organisasi non profit lainnya walaupun tampak sederhana dan tidak sekompleks pengelolaan keuangan organisasi profit, namun demikian harus tetap mengikuti perkembangan jaman dan perubahan-perubahan ketentuan yang relevan dengan pengelolaan keuangan OMS. Oleh karena itu, mutlak bagi para pengelola keuangan OMS dan organisasi non profit lainnya untuk selalu mengasah kemampuan, membuka wawasan keuangan di luar organisasinya agar terinformasi hal-hal baru dalam pengelolaan keuangan. Sebagai contoh nyata, pengelolaan keuangan khususnya pemenuhan kewajiban perpajakan, sampai dengan tahun 2023, kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 menggunakan aplikasi SPT Masa PPh 21 versi CSV. Kemudian tahun 2024 pelaporannya tidak lagi dengan CSV, tetapi langsung secara online melalui portal [djponline](#). Lalu tahun 2025 ini portal [djponline](#) tidak digunakan alias digantikan dengan aplikasi yang baru yaitu portal [CORETAX](#).

Dari contoh di atas, maka peningkatan wawasan pengetahuan dan pengelolaan keuangan bagi para pengelola keuangan OMS menjadi hal yang mutlak. Banyak cara untuk dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan OMS dengan mencari portal dan platform yang menyediakan bahan bacaan terkait termasuk platform Re.Search atau dapat mengikuti pelatihan-pelatihan keuangan termasuk pelatihan-pelatihan keuangan yang diselenggarakan PLUS melalui program Re.Search.

b.

Menggunakan Alat Bantu Pertanggungjawaban Keuangan untuk Memudahkan Pekerjaan

Selain meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengelolaan keuangan OMS, para pengelola keuangan juga harus mengaktualisasi pengetahuan lainnya dalam hal pelaporan keuangan. Sudah bukan saatnya mempertahankan pola lama tanpa mengikuti kemajuan teknologi. Sebagai contoh, dulu pelaporan keuangan cukup dibantu dengan mencatat di buku secara fisik. Lalu pelaporan keuangannya dibuat dengan membuat rekapan dari buku tersebut. Pola ini sangat berisiko penyajian laporan keuangan menjadi tidak akurat karena ada yang terlewat atau tidak terjumlah atau terhapus.

Lalu sedikit lebih maju, buku catatan yang secara fisik di atas mulai digantikan dengan menggunakan komputer yang ada aplikasi spreadsheet untuk mengelola catatan keuangan. Namun, sayangnya penggunaan komputer tersebut hanya sebatas menuliskan kembali catatan yang ada di buku manual tadi, maka pola ini tetap memiliki risiko yang sama dengan pencatatan transaksi keuangan manual dengan buku secara fisik.

Dari kedua contoh di atas, maka para pengelola keuangan membutuhkan alat bantu untuk mencatat transaksi keuangan dan mempertanggungjawabkannya dalam suatu laporan keuangan dengan alat bantu yang sesuai. Teknologi saat ini memungkinkan kita untuk bisa bekerja dari mana saja atau tetap bekerja dari kantor. Oleh karena itu, dibutuhkan alat bantu yang sesuai dengan cara kita bekerja.

Lampiran

Catatan E

Beban yang terjadi adalah:

	Program			Manajemen & Umum	Pendanaan	Total
	A	B	C			
Gaji, Upah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jasa dan Profesional	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Admisintrartif	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Depresiasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Bunga	-	-	-	xxxx	xxxx	xxxx
Lain-Lain	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Total Beban	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Re. Search

*Resource Hub for Strengthening
Capacity on Financial Resiliency*



Resource Hub for Strengthening
Capacity on Financial Resilience



re-search.id



team@re-search.id



[pojokbelajarcso](https://www.instagram.com/pojokbelajarcso)